



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**AKTA PENGAJUAN KETERANGAN BAWASLU  
Nomor xx-xx-xx/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/.../2019**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu sembilan belas** pukul ... WIB telah diajukan Keterangan Bawaslu, oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBERI KETERANGAN;**

Dalam perkara antara:

..., Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, Pada Provinsi ... . Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ..., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor xx-xx-xx/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal ... dengan registrasi perkara Nomor ...-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

Terhadap Keterangan Bawaslu tersebut, Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan SDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.